



## Penanganan Masalah Anak Penyandang Kesejahteraan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19

Eko Hidayat<sup>1</sup>  
ekohidayat@radenintan.ac.id  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Iskandar Syukur<sup>2</sup>  
iskandarsyukur@radenintan.ac.id  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Agus Iskandar Pradana Putra<sup>3</sup>  
agus@ecampus.ut.ac.id  
Universitas Terbuka

**Abstrak:** Banyaknya anak jalanan di Provinsi Lampung ini menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satu generasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan penanganan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian yaitu Model kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui model pendekatan berbasis panti sosial, model pendekatan berbasis keluarga, model pendekatan berbasis masyarakat dan model pendekatan berbasis semi panti sosial, telah dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro oleh pelaksana program dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah dan swasta terkait dan masyarakat. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program adalah Terbatasnya sumber daya manusia, Terbatasnya sarana dan prasarana, Sulitnya proses identifikasi, Sulitnya membina kesejahteraan penyandang sosial, minimnya tahap penyaluran ke keluarga.

**Kata kunci:** Covid-19, Kesejahteraan Sosial Anak, Penyandang Kesejahteraan Sosial

**Abstract:** *The large number of street children in Lampung Province shows that there are social welfare problems that the government needs to pay attention to, considering that children are the next generation in the development of a nation. Failure to deal with street children is the same as allowing a generation to be lost in realizing sustainable national development, so that social welfare is needed. This research aims to study intensively the policies for handling children with social welfare problems in Lampung Province during the Covid-19 pandemic. The results of the research are the policy model for dealing with street children implemented through a social institution-based approach model, a family-based approach model, a community-based approach model and a semi-social institution-based approach model, which has been carried out by the Bandar Lampung City and Metro City governments by program implementers involving several agencies government, related private sector and society. The factors that hinder the implementation of the program are limited human resources, limited facilities and infrastructure, difficulty in the identification process, difficulty in fostering the welfare of people with social disabilities, and minimal distribution stages to families.*

**Keywords:** *Covid-19, Children's Social Welfare, People with Social Welfare*

### Pendahuluan

Di kota-kota besar di negara berkembang seperti Indonesia, harus diakui bahwa perkembangan pesat pola kehidupan perkotaan seringkali tidak sejalan dengan perkembangan kemampuan perkotaan yang signifikan. Bahkan, beberapa di antaranya justru mengalami penurunan



kualitas dan kapasitas. Misalnya, masalahnya kemiskinan perkotaan semakin kompleks akibat marjinalisasi akses ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini dibandingkan dengan Jakarta, perkembangan kepadatan penduduk Provinsi Lampung masih rendah. Namun, perkembangan pesat pendatang di Provinsi Lampung bukan tidak mungkin berdampak pada jumlah penduduk yang terus meningkat, yang akan meningkat drastis. Menurut Luthfi Muhamad Iqbal, pada 2045<sup>1</sup>, Lampung akan berkembang menjadi kota besar atau metropolitan bersama dengan Padang dan Jambi. Provinsi Lampung merupakan kawasan perkotaan besar dengan jumlah penduduk yang besar., Artinya, beban yang harus ditanggung oleh Provinsi Lampung bukan hanya masalah internal yang diakibatkan oleh tekanan pertumbuhan penduduk asli, tetapi juga masalah penataan ruang dan permukiman, serta fasilitas umum warga Provinsi Lampung.

Menurut data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 9.176546 juta jiwa.<sup>2</sup> Namun, sebagai kawasan kota, jumlah penduduk dan berbagai permasalahan sosial yang timbul darinya sebenarnya telah melampaui cakupan administratif kawasan perkotaan. Penduduk yang berada di dekat kawasan perkotaan Provinsi Lampung sebagian bekerja, mengeluarkan uang. Kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi tentunya rentan terhadap gesekan kehidupan sosial yang berdampak pada munculnya permasalahan sosial perkotaan, terutama pada kawasan padat penduduk. Berbagai permasalahan sosial perkotaan, seperti di Provinsi Lampung salah satunya adalah adanya pengemis dan anak jalanan banyak memadati di wilayah perkotaan.

Banyaknya anak jalanan di Provinsi Lampung ini menunjukkan adanya permasalahan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus dalam pembangunan sebuah bangsa. Kegagalan menangani anak jalanan sama artinya dengan membiarkan satu generasi yang hilang dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan bangsa, sehingga diperlukan adanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 4 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam undang-undang tersebut juga tertulis bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Jumlah anak jalanan cenderung terus meningkat. Pada masa pandemi Covid-19 ini, menunjukkan adanya kenaikan anak jalanan. Pada tingkat Nasional, terdapat sekitar 2,5 juta anak jalanan yang mendapat bantuan dari BKSNN (Badan Kesejahteraan Sosial Nasional) dan Dinas Sosial

---

<sup>1</sup> Luthfi Muhamad Iqbal, "Menerka Kota-Kota Indonesia Dalam Batas-Batas Administrasinya 2015–2045," Medium, 2019, <https://luthfi-iqbal.medium.com/menerka-kota-kota-indonesia-19cef8cd3249>.

<sup>2</sup> BPS Provinsi Lampung, "Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020-2022," 2022, n.d.



dalam pengembangan ketrampilan. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung tahun 2020, ada sekitar 1.760 anak jalanan di Provinsi Lampung.<sup>3</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak turun ke jalanan adalah untuk bekerja (mencari uang), sementara sebagian kecil dari mereka yang hanya berkeliaran. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung merupakan persoalan sosial yang multidimensional, namun perhatian terhadap permasalahan anak jalanan belum begitu besar dan solutif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas mengenai penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan, perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak jalanan adalah anak yang terkategori tak berdaya. Mereka merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Lampung harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan, untuk menyikapi dampak makin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak jalanan perlu diberdayakan salah satunya melalui pemberian pendidikan, sehingga anak jalanan dapat lebih memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.<sup>4</sup> Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah ketidakmampuan.

Pemberdayaan merupakan salah satu langkah menuju arah yang lebih baik dimana memberikan atau membuat suatu perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya pemberdayaan, setidaknya dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan memberikan kekuasaan bagi setiap individu untuk dapat memilih sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, tidak terkecuali pada anak jalanan di Provinsi Lampung yang mana dengan adanya pemberdayaan melalui pendidikan akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkualitas.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>5</sup> Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the*

---

<sup>3</sup> BPS, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020," BPS Provinsi Lampung, 2021, <https://lampung.bps.go.id/statictable/2015/08/06/255/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2020.html>.

<sup>4</sup> Wahyudin, Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: Read, 2011).

<sup>5</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002).



*Policy Implementation.* Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab mendefinisikan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Van Meter dan Van Horn juga merumuskan model pendekatan implementasi kebijakan yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang terdiri dari:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber (sumber daya);
3. Karakteristik organisasi pelaksana;
4. Sikap para pelaksana;
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.<sup>6</sup>

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat dengan PMKS adalah perorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.<sup>7</sup> Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Misalnya untuk memberikan kesejahteraan di bidang pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) maka pemerintah pusat membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, sehingga dengan adanya peraturan ini baik anak yang mampu maupun tidak mampu bisa samasama mengenyam pendidikan.

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

---

<sup>6</sup> A. S. Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

<sup>7</sup> Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan* (Yogyakarta: Media Wacana, 2007).



dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan dalam tulisan ini dimaknai sebagai model-model kebijakan sosial. Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial model terutama dibuat untuk menjelaskan proses, karakteristik, mekanisme serta menentukan strategi kebijakan sosial, tujuan apa yang akan dicapai oleh kebijakan sosial? pelayanan sosial apa yang akan diberikan dan siapa yang akan menjadi sasaran pelayanan tersebut? “metode apa yang akan digunakan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pemberian pelayanan sosial?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya merupakan aspek-aspek yang dijelaskan oleh sebuah model kebijakan penanggulangan anak jalanan. Menurut Edi Suharto<sup>8</sup> model kebijakan sosial dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

#### 1. Berdasarkan Pelaksanaannya

Berdasarkan model pelaksanaannya, model kebijakan dapat dibagi dua yakni model kebijakan sosial imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosial, jenis, sumber, dan jumlah pelayanan sosial seluruhnya telah ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan seperti ini menunjuk pada pengertian kebijakan sosial yang dinyatakan oleh Dye “*social policy is concerned with what governments do, why they do it, and what difference it makes*”. Kebijakan sosial indikatif adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat. Pemerintah biasanya hanya menentukan sasaran kebijakan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat atau badan-badan swasta (lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi sosial). Kebijakan sosial indikatif sering pula disebut kebijakan sosial partisipatif.<sup>9</sup>

#### 2. Berdasarkan Ruang Lingkup

Dilihat dari cakupannya, dikenal model universal dan model selektifitas. Model universal adalah kebijakan sosial yang diarahkan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial warga masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan usia, jenis, kelamin, dan status sosial. Kebijakan sosial yang bersifat selektifitas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja. Prinsip selektifitas menyatakan bahwa pelayanan sosial hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan saja, yaitu mereka yang mengalami masalah dan membutuhkan pelayanan tertentu.

#### 3. Berdasarkan Keberlanjutannya

---

<sup>8</sup> Suharto Edi, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial)* (Bandung: Alfabeta, 2005).

<sup>9</sup> James Anderson E., *Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston* (New York: CBS College Publishing, 1984).



Model residual dan model institusional adalah dua model kebijakan sosial dilihat dari keberlanjutan atau keajengan pelayanan sosial. Menurut model residual kebijakan sosial hanya diperlukan apabila lembaga-lembaga alamiah yang karena suatu sebab tidak dapat menjalankan peranannya. Pelayanan sosial yang diberikan biasanya bersifat temporer, dalam arti segera dihentikan manakala lembaga tersebut dapat berfungsi kembali. Menurut model institusional, kebijakan sosial perlu dirumuskan tanpa mempertimbangkan berfungsi tidaknya lembaga-lembaga alamiah. Pelayanan sosial yang diberikan bersifat ajeg, melembaga dan berkesinambungan.

#### 4. Berdasarkan Sasarannya

Menurut jenis permasalahannya kebijakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam model kategorikal dan model komprehensif. Kebijakan sosial kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu, misalnya kebijakan sosial di bidang pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan. Kebijakan sosial komprehensif diarahkan tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dan dirumuskan dalam satu formasi kebijakan sosial terpadu. Kaitannya dengan model-model kebijakan sosial diatas dalam implementasinya dilakukan model-model pendekatan penanggulangan anak jalanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI adalah:

- a. *Child based services* yaitu model pendekatan yang menempatkan anak sebagai basis penerima pelayanan
- b. *Institutional based services* yaitu model pendekatan berbasis panti sosial
- c. *Family based services* yaitu model pendekatan yang menjadikan keluarga sebagai basis dan sasaran serta medium utama pelayanan
- d. *Community based services* yaitu model pendekatan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan
- e. *Location based services/street based services* yaitu model pendekatan yang memberikan pelayanan pada lokasi anak yang mengalami masalah
- f. *Half-way house services* yaitu model pendekatan semi panti sosial
- g. *Stated based services* yaitu model pendekatan pelayanan yang bersifat makro dan tidak langsung.

Pelaksanaan berbagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi sempat terbentur Covid-19. Wabah Covid-19 ini merubah kebiasaan hidup, pola interaksi dan perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan massif, tidak hanya menysar aspek kesehatan tetapi juga bidang ekonomi, psikologi, sosial, politik, pendidikan, budaya, keagamaan, dan sebagainya sehingga perlu dihandel dengan kebijakan pemerintah yang tepat. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah



mestinya dibuat untuk menjawab kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>10</sup>

Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui dengan datangnya pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya.<sup>11</sup> Hambatan dalam penanganan berasal dari ketidakpatuhan masyarakat dan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.<sup>12</sup>

Covid-19 adalah virus corona baru yang terkait dengan SARS-CoV yang menyebar pada pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok.<sup>13</sup> Penyebaran Covid-19 ke Indonesia ini dapat mengancam ketahanan negara.<sup>14</sup> Ancaman tersebut terjadi karena Covid-19 mengubah gaya hidup setiap orang, termasuk pada anak dengan masalah kesejahteraan sosial di Indonesia.

Penelitian ini adalah bentuk dari pengembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya ini dilakukan untuk memotret dan mengambil jarak pembeda dengan penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Ni Putu Ruslina Darmayanthi, Badrudin Kurniawan. *Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)*. Publika, Vol. 10 No. 1, 2022.<sup>15</sup> Menurut Ni Putu, implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) khususnya bagi anak jalanan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan dorongan dari anak jalanan tersebut dan juga pendampingan dari pihak terkait.
2. Fatwa Nurul Hakim, Eksistensi Pendamping Sosial Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*: Vol. 11, No. 2, 2022.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Laode Harjudin Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksono, Abu Huraerah, "Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021): 97.

<sup>11</sup> Muhyiddin, "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Development Planning* IV, no. 2 (2020): 240.

<sup>12</sup> Meilinda Triana Pangaribuan and Adis Imam Munandar, "Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19," *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.12706>.

<sup>13</sup> Cheng-Bin Wang & Sergio Bernardini Marco Ciotti, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, "The COVID-19 Pandemic," *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57, no. 6 (2020): 365–388.

<sup>14</sup> Mardiana Zulfi Krisnawati Dwizka, Trisiana Anita, Mey Elynia, Elvidna Varelia, Maharani yesica Budi Puspita, "63 JGC IX (1) (2020) JURNAL GLOBAL CITIZEN KETAHANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA PANDEMIK COVID-19 Dwizka Krisnawati (1) ,Anita Trisiana (2) ,Elynia Mey (3) ,Varelia Elvidna (4)," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2020): 63–70, <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>

<sup>15</sup> Badrudin Kurniawan Publika Ni Putu Ruslina Darmayanthi, "Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)," *Publika* 10, no. 1 (2022).

<sup>16</sup> Fatwa Nurul Hakim, "Eksistensi Pendamping Sosial Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 8, no. 1 (2022).



3. Ellya Susilowati, *Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sosio Informa*: Vol. 8, No. 1, 2022.<sup>17</sup>
4. Vita Rachmawati, Dodi Faedlulloh. *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. Journal Of Political Issues*: Vol 2, No 2, 2021.<sup>18</sup>
5. Budi Astuti, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak. Jurnal Hukum*: Vol. 35, No. 1, 2019.<sup>19</sup>

Berdasar pemaparan penelitian terdahulu yang relevan, maka titik pembeda terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji temuan yang ada di lapangan terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial pada anak. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam penggunaan metode penelitiannya. Fokus penanganan masalah kesejahteraan sosial anak pada masa Covid-19 juga menjadi suatu pembeda dengan penelitian sebelumnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta didukung dengan dokumentasi terkait dan sumber ilmiah lain yang relevan baik dari jurnal maupun buku tentang kesejahteraan sosial anak. Pihak yang menjadi informan utama dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari: 2 orang Kepala Bagian Reheabilitasi Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2 Kasi Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2 orang Staf Dinas Sosial kota Bandar Lampung dan Kota Metro, 2 orang Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi PamongPraja kota Bandar Lampung dan kota Metro dan 2 orang pengurus Rumah Singgah kota Bandar Lampung dan kota Metro, 2 orang anak jalanan kota Bandar Lampung dan kota Metro, 2 orang orang tua anak jalanan kota Bandar Lampung dan kota Metro. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif berdasar aturan yang berlaku terkait penanganan masalah kesejahteraan sosial anak. Data kemudian dianalisis secara induktif dengan model deskriptif kualitatif untuk menarik simpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

<sup>17</sup> Ellya Susilowati, "Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak," *Sosio Informa* 8, no. 1 (2022).

<sup>18</sup> Dodi Faedlulloh Vita Rachmawati, "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan," *Journal Of Political Issues* 2, no. 2 (2021).

<sup>19</sup> Budi Astuti, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak," *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019).





## Pembahasan

### **Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19**

Kebijakan penanggulangan anak jalanan di Provinsi Lampung mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yang mencakup empat pendekatan. Pendekatan dimaksud meliputi penanganan anak jalanan berbasis panti, penanganan melalui pendekatan berbasis keluarga, penanganan berbasis komunitas dan pendekatan berbasis rumah semi panti sosial. Dari keempat pendekatan yang saling melengkapi ini ternyata mampu menanggulangi sebagian masalah yang ada. Kebijakan ini secara substansial berupaya menangani kebutuhan dasar anak jalanan yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual anak jalanan. Untuk pendekatan berbasis panti, anak jalanan diberikan layanan sesuai kondisi masalah anak jalanan itu sendiri. Pada awalnya diadakan kegiatan telaah masalah, kebutuhan dan potensi anak jalanan sebagai penerima manfaat (*needs assessment dan potencies assessment*). Berangkat dari pemahaman dasar atas kondisi anak jalanan maka dilakukan rencana penanganan dan kemudian implementasi dari rencana penanganan dimaksud.

Penanganan ini mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pelatihan ketrampilan serta bimbingan sosial psikologis agar anak mampu menjalani hidup secara wajar di masyarakat. Anak-anak diberikan bimbingan ketrampilan sesuai bakat dan minatnya. Demikian juga yang masih sekolah didukung sedemikian rupa agar anak mengutamakan sekolahnya, sehingga tidak terlalu berkonsentrasi pada kegiatan di jalanan. Pada saat yang sama, anak diberikan layanan pangan dan sandang serta didukung keperluan sekolahnya. Dengan demikian anak tidak ke jalanan dengan alasan untuk mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan serta membantu orang tua mencari nafkah. Penanganan anak jalanan ini perlu dipandang bahwa masalah utamanya bukan hanya pada si anak itu sendiri, tetapi juga faktor di mana anak tinggal. Pihak yang paling dekat adalah keluarga. Oleh karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual, maka anak mencari pemenuhan di luar dan merasakan mendapatkan sesuatu yang baik bagi diri anak dari lingkungan sebayanya. Demikian juga komunitas di mana anak tinggal memberikan peluang kepada anak untuk melakukan aktivitas jalanan. Oleh karena itu teramat diperlukan untuk menyentuh masalah anak jalanan ini melalui sentuhan kepada si anak itu sendiri, kepada keluarganya melalui pemberdayaan, serta sentuhan kepada komunitas di mana anak jalanan tinggal.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa ada tujuh model kebijakan dalam pendekatan penanggulangan anak jalanan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Ada empat jenis model pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yaitu:



### 1. *Institutional Based Services* atau Model Pendekatan Berbasis Panti.

Model pendekatan ini digunakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan Bandar Lampung dan LKSA Sunan Gunung Jati Kota Metro kepada anak jalanan usia produktif usia produktif. Model pendekatan yang dilaksanakan adalah pelayanan pengasramaan dengan cara mengelompokkan anak jalanan sesuai jenis kelamin serta jenis keterampilan yang dipilih anak. Anak jalanan mendapat perlindungan fisik melalui kegiatan olahraga dan perlindungan psikis melalui pembinaan mental,serta pelayanan pendidikan dan keterampilan menjahit bagi anak jalanan perempuan, keterampilan tata rias rambut bagi anak jalanan wanita, keterampilan perbengkelan bagi orang anak jalanan laki-laki, keterampilan service HP bagi orang anak jalanan laki-laki dan keterampilan elektronik bagi orang anak jalanan laki-laki, serta program rehabilitasi lainnya. Implementasi model pendekatan ini diarahkan pada tujuan pembinaan kesejahteraan anak tentang hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab. 2 Pasal 2 (ayat) 1 yaitu “hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar”.

Asuhan khusus dimaksud dilakukan dalam panti sosial dengan sistem asrama yang dilakukan para petugas panti selaku pengawas asrama dan orang tua asuh melalui kegiatan pemberian kebutuhan dasar anak jalanan berupa makanan bergizi, pakaian seragam, peralatan mandi dan perawatan kesehatan berupa obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan agar mereka (anak jalanan) tumbuh dan berkembang secara wajar. Selanjutnya poin 2 dari undang-undang tersebut menyatakan “hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.Untuk mengembangkan kemampuan anak jalanan lembaga (PSBR Raden Intan Bandar Lampung) melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan keterampilan. Disamping itu model institutional (lembaga) ini melindungi anak jalanan dari kekerasan dan eksploitasi baik yang dilakukan oleh orang tua/keluarganya sendiri maupun oleh preman jalanan.

### 2. *Family Based Services* Di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro

Model pendekatan ini dilakukan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro pada keluarga/orang tua anak jalanan. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 pasal 20 diamanatkan ‘orang tua adalah yang pertama-tama berpengaruh atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani”. Untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro melaksanakan kegiatankegiatan yang ditujukan kepada keluarga/ orang tua anak jalanan, kegiatan ini dinamakan ‘penguatan fungsi keluarga’,



karena permasalahan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro penyebab utama mereka turun ke jalan adalah atas dorongan keluarga/orang tuanya. Kalau dilihat dari nilai-nilai budaya yang ada pada mereka para anak jalanan ini adalah anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka, apapun yang diperintahkan dipatuhi termasuk perintah untuk mencari nafkah di jalanan dengan cara mengemis, mengamen dan menjual koran.

Penekanan pada model pendekatan ini adalah merubah pola pikir para orang tua anak jalanan, bagaimana aspirasi orang tua terhadap anaknya, apa yang diinginkan dari anaknya. Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh para pekerja sosial adalah memberikan bimbingan mental kepada 32 orang tua anak jalanan berupa pengajian dan ceramah agama yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai tujuan utama model pendekatan ini, disamping itu diberikan bantuan sembako dan modal untuk usaha ekonomi produktif dalam rangka penguatan fungsi keluarga/orang tua.<sup>20</sup> Strategi penguatan fungsi keluarga menjadi urgen untuk dilakukan sehingga dapat meminimalisir dan meningkatkan kewaspadaan keluarga dan masyarakat dari keterpaparan Covid-19.<sup>21</sup>

### 3. *Community Based Services Model* atau Model Pendekatan Berbasis Komunitas

Model pendekatan ini menggunakan masyarakat sebagai basis pelayanan, sasaran pelayanan model pendekatan ini adalah anak jalanan usia balita 0-5 tahun sebanyak 20 anak, anak jalanan usia sekolah 6-15 tahun sebanyak 20 anak, anak jalan usia produktif 15-20 tahun 15 anak dan keluarga/orang tua anak jalanan 35 orang.<sup>22</sup> Pekerja sosial bersama masyarakat sekitar tempat tinggal anak jalanan merancang suatu kegiatan yakni penimbangan bayi dan pemberian makanan bergizi bagi anak jalanan usia balita. Kegiatan sunatan masal dan kelompok belajar paket A bagi anak jalanan usia sekolah. Untuk anak usia produktif diberikan kursus keterampilan menjahit untuk anak jalanan perempuan dan perbengkelan untuk anak jalanan laki-laki. Untuk keluarga/orang tua diberikan keterampilan membuat kue serta bantuan peralatan. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama dengan puskesmas setempat, dinas pendidikan kecamatan, masyarakat sekitar tempat tinggal anak jalanan dan pengusaha setempat. Model pendekatan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 11 dinyatakan pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat”.

---

<sup>20</sup> Farida, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan, Wawancara,”

<sup>21</sup> I DEWA MADE SUKA, “STRATEGI PENGUATAN FUNGSI KELUARGA PADA ERA PANDEMI COVID-19,” *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2021).

<sup>22</sup> Farida, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan, Wawancara,”



Untuk menaikkan kesadaran masyarakat dalam masa pandemi, salah satu caranya adalah melalui komunikasi persuasif di mana kesuksesan komunikasi persuasif kepada masyarakat didukung oleh beberapa aspek penting yang meliputi kredibilitas dan kepercayaan yang ditunjukkan melalui kepedulian dan empati, keahlian dan kompetensi, keterbukaan dan kejujuran, serta komitmen dan dedikasi.<sup>23</sup>

#### 4. *Half-way House Services Model*

Model pendekatan berbasis rumah semi panti sosial Model pendekatan ini digunakan oleh Rumah Asuh Yatim Bina Ruhama Kota Metro yang membina anak usia sekolah melalui program “*back to school*” yaitu menyekolahkan anak yang belum bersekolah dan putus sekolah pada beberapa SD maupun SMP di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Membina anak usia produktif melalui program “*live skill*” yaitu memberikan pelatihan keterampilan menjahit, tata rias, perbengkelan dan service HP pada lembaga-lembaga kursus. Sedangkan untuk keluarga/orang tua anak jalanan melalui program “pemberdayaan keluarga” yaitu diberikan bantuan sembako dan modal usaha produktif. Rumah Asuh Yatim Bina Ruhama Kota Metro adalah rumah persinggahan anak jalanan dan keluarga/orang tuanya untuk berkonsultasi dengan para pekerja sosial mengenai perkembangan pendidikan di sekolah maupun lembaga kursus dan para keluarga/orang tuanya mengemukakan permasalahannya baik tentang anaknya maupun usahanya. Rumah panti ini juga dijadikan tempat bertemunya anak-anak jalanan sekaligus mencegah mereka untuk tidak turun ke jalan lagi. Anak jalanan dan orang tidak tinggal di rumah perlindungan ini, tapi di tempat tinggalnya sendiri.<sup>24</sup>

### **Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19**

Penghambat atau hambatan merupakan kata dasar dari penghambat berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar. Penghambat berarti orang yang menghambat, alat yang digunakan untuk menghambat. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu.<sup>25</sup> Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa penghambat adalah suatu keadaan yang selalu dalam keadaan tidak lancar atau mengalami gangguan. Sedangkan faktor penghambat penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro adalah<sup>26</sup>:

#### 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

---

<sup>23</sup> L Defilah, S Sarmiati, and E R Roem, “Hambatan Komunikasi Persuasif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Dalam Program Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Kota Padang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16496–505, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5116>.

<sup>24</sup> Farida, “Ketersediaan Anggaran Pembinaan, Wawancara,”

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).

<sup>26</sup> Maryoto Arifandi, “Wawancara ‘Ketersediaan Anggaran Pembinaan,’” n.d.



Pelaksanaan pemberian layanan oleh pekerja sosial adalah untuk membimbing penyandang masalah kesejahteraan sosial, hanya saja jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kurangnya pegawai di bidang IT. Hal ini belum memenuhi standar pelayanan publik.

## 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Kurang lengkapnya fasilitas terkait penanggulangan anak jalanan baik tempat maupun perlengkapan rumah singgah yang memadai menjadi faktor pengaruh kurangnya standar pelayanan publik. Padahal berdasarkan teori standar pelayanan publik salah satunya sarana prasarana harus ditetapkan standar prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembinaan.

## 3. Sulitnya Proses Identifikasi

Proses identifikasi sering mengalami kendala karena narasumber yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial menjawab pertanyaan yang diajukan pegawai tidak konsisten. Hal ini karena penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki ciri-ciri diantaranya mengalami penurunan daya ingat dan kognitif serta berpikiran aneh, berbicara tidak sesuai dengan keadaan.

## 4. Sulitnya Membina Kesejahteraan Penyandang Sosial

Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial diperlukan beberapa cara oleh pekerja sosial agar mau mengikuti dalam kegiatan pembinaan. Tetapi hal tersebut tidak terlalu efektif karena banyak penyandang yang tidak mau mengikuti pembinaan.

## 5. Minimnya Tahap Penyaluran Kepada Keluarga

Ada tahap penyaluran terhadap kendala untuk dikembalikan ke keluarga dan masyarakat karena banyak keluarga penyandang tidak diketahui keberadaannya. Hal ini relevan dengan teori komponen kesejahteraan sosial. Dalam hal ini peran masyarakat yaitu keluarga diperlukan namun keberadaannya tidak diketahui secara pasti.

Peneliti menemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa anak jalanan yang sudah dirazia atau sudah masuk penjaringan oleh dinas sosial, mereka banyak yang kembali ke jalan-jalan dan tempat-tempat publik. Dinas sosial tidak memberikan hukuman sebagai efek jera bagi mereka. kegiatan-kegiatan yang dilakukan dinas sosial untuk anak jalanan sudah baik, namun masih banyak orangtua yang mengeksploitasi dan membiarkan anaknya untuk mencari uang dengan cara mengamen dan meminta-minta di tempat-tempat umum dan di pinggir-pinggir jalan raya, hal ini tentunya akan membahayakan keselamatan anak maupun pengendara. Pembinaan yang dilakukan dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro masih kurang maksimal karena panti singgah yang di miliki dinas sosial keberadaannya tidak memungkinkan untuk menampung mereka, akibatnya banyak dari mereka yang kembali turun ke jalan dan kembali melakukan aktivitas mengamen dan meminta-minta.



Dinas sosial Kota Bandar Lampung dan Kota Metro cukup besar untuk biaya hidup anak jalanan di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta, sehingga pelayanan yang tidak terjangkau dan akibatnya masih banyak anak jalanan yang berkeliaran di wilayah-wilayah Brebes baik di tempat umum maupun di pinggir jalan raya. Masyarakat juga seakan tidak peduli dengan maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, padahal masalah kesenjangan sosial ini adalah masalah Bersama. Hambatan yang selanjutnya adalah pada rehabilitasi anak jalanan, kendala yang dihadapi biasanya terdapat di dalam diri anak yang sedang direhabilitasi yaitu kurangnya motivasi diri dari anak-anak, hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan dan dalam zona nyaman bagi anak jalanan. Anak jalanan yang sudah lama di jalan dapat dipastikan betah dengan kondisi tersebut, karena bagi mereka jalanan adalah kehidupan mereka dari mencari uang hingga bermain, sehingga dibutuhkan tenaga ekstra untuk membangun karakter anak supaya tidak lagi memiliki mental jalanan dan menjadikan mereka anak-anak yang berdaya guna dan memiliki masa depan yang cerah. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah tidak ada dukungan dari orang tua atau keluarga anak jalanan, ini disebabkan anak jalanan itu sendiri menjadi tulang punggung orang tua dalam mencari penghasilan. Anak jalanan dan keluarganya merupakan bagian masyarakat yang rentan terhadap lingkungan sekitar, itulah yang menjadi mereka sulit untuk dientaskan. Kemiskinan menjadi faktor utama anak-anak menjadi tulang punggung keluarga. Keadaan yang sulit tersebut memaksa anak-anak untuk turun ke jalan dan mencari penghasilan dengan memintaminta, mengamen dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang lain yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tahap-tahap kegiatan rehabilitasi sosial yaitu ketika anak-anak tersebut berada di penampungan sementara. Banyak anak yang ketika ditampung di tempat panti asuhan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) merasa tidak betah dan ingin kembali ke jalanan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pendekatan awal dan pemahaman masalah (*Assasment*). Jika hal itu sulit dilakukan maka dalam bimbingan sosial dan penanggulangan pun akan mengalami masalah. Kendala yang berikutnya adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana (*Budget Constraint*) merupakan salah satu kendala dalam suatu pengimplementasian sebuah kebijakan. Salah satunya adalah penanggulangan anak jalanan oleh dinas sosial di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Keterbatasan dana dalam penanganan anak jalanan, menimbulkan pelaksanaan kebijakan dalam penanganan anak jalanan tidak maksimal. Sosialisasi sebuah program kebijakan tidak berjalan dengan baik. Salah satu penyebab tidak maksimalnya penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial adalah disebabkan karena keterbatasan dana. Kurangnya dana yang turun dari pusat dan turunnya dana hanya sekali dalam setahun menjadikan penanganan dan sosialisasi tidak berjalan dengan maksimal. Upaya yang dilakukan dalam setiap rapat tidak mendapat respon dari pemerintah,



terutama pemerintah daerah, padahal penanganan anak jalanan sangat besar, membutuhkan kinerja yang sangat besar pula. Karena anak jalanan selama ini semakin bertambah dan dari tahun ketahun.

Kendala lain adalah tidak adanya rumah. Kendala lain adalah tidak adanya rumah singgah, Rumah singgah merupakan suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah ialah proses informal yang memberikan suasana resosialisasi kepada anak jalanan terhadap system nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat. Salah satu penyebab tidak maksimalnya penanggulangan anak jalanan yang dilakukan dinas sosial adalah tidak adanya rumah singgah untuk menampung mereka agar diberikan pembinaan.

Pelaksanaan penanganan anak jalana selama ini yang dilakukan oleh dinas sosial setelah melakukan pendataan, anak jalanan ditampung sementara dalam beberapa jam di Aula kantor dinas sosial untuk diberikan pembinaan dalam bentuk pembinaan mental dan spiritual dengan tujuan agar mereka tidak lagi kembali turun kejalan untuk beraktivitas. Namun hal ini hanya sia-sia, mereka tetap kembali berada di jalan untuk beraktivitas seperti biasa. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, Partisipasi serta kesadaran masyarakat luas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut. Salah satunya adalah program penanganan anak jalanan, karena anak jalanan selalu dekat dengan aktivitas masyarakat luas. Tanpa dukungan partisipasi serta kesadaran masyarakat maka program penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap anak jalanan yang berdampak negatif pada upaya penanggulangan anak jalanan di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro yakni masyarakat memberikan uang atau barang kepada anak jalanan atau membeli barang atau jasa anak jalanan. Salah satu hambatan penanganan anak jalanan ialah minimnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pemberian uang kepada para anak jalanan merupakan suatu yang hal lumrah untuk dilakukan, yang mengakibatkan terbentuknya pola berfikir dari para anak jalanan untuk terus mendapatkan uang dengan cara mengamen maupun mengemis di jalanan serta aktivitas yang lain.

Penanganan Covid-19 memerlukan berbagai pendekatan yang komprehensif. Penanganan Covid-19 yang berdampak pada seluruh elemen masyarakat, termasuk anak dengan masalah kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan dengan kearifan lokal.<sup>27</sup> Dukungan partisipasi

---

<sup>27</sup> Agung Wicaksono Hafis Vian Yudha Ardhana, Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, Muhammad Rayhan Kurnia Pratama, Sofiah Rizki Jannatulloh, Fachrurizal Mahendra Sujonot, "Kearifan Lokal Sebagai Solusi Penanganan Serta



masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi factor penunjang.<sup>28</sup> Sebab, penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait sangat intens.<sup>29</sup>

Secara teoritis ada tiga peran pemerintah dalam perekonomian yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi ataupun implementasi di lapangan. Akan tetapi, dengan adanya setiap kebijakan yang dilakukan baik itu stimulus fiskal yang dikenal dengan nama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan public goods yang berguna untuk kepentingan masyarakat.<sup>30</sup> Teori peran pemerintah tersebut, dapat diaplikasikan pada upaya penanganan masalah anak dengan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung.

### **Kesimpulan**

Penanganan masalah kesejahteraan sosial pada anak di Provinsi Lampung dilakukan dengan model pendekatan berbasis panti sosial anak dan pendekatan berbasis keluarga. Penanganan tersebut dilakukan sinergi antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat di Kota Bandar Lampung. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program tersebut adalah terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana; sulitnya proses identifikasi dan pembinaan kesejahteraan penyandang sosial; serta minimnya tahap penyaluran bantuan ke keluarga. Dari sini, diperlukan implementasi kebijakan penanganan masalah kesejahteraan sosial pada anak dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga pihak terkait.

### **Referensi**

- A. S. Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Antun Rahmadi, Sutrio, Arie Nugroho, Bertalina, Dewi Sri Sumardilah, Usdeka Muliani, Mindo Lupiana, Roza Mulyani, Endang Sri Wahyuni, Sefanadya Putri, Yulia Novika J., Nawasari Indah Putri Sejat. "Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung Menuju Desa Tangguh Covid-19." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)* 1, no. 2 (2021): 55.
- Arifandi, Maryoto. "Wawancara 'Ketersediaan Anggaran Pembinaan,'" n.d.
- BPS. "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020." BPS Provinsi Lampung, 2021.

---

Mitigasi Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung Dan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 2 (2021): 251.

<sup>28</sup> Nawasari Indah Putri Sejat Antun Rahmadi, Sutrio, Arie Nugroho, Bertalina, Dewi Sri Sumardilah, Usdeka Muliani, Mindo Lupiana, Roza Mulyani, Endang Sri Wahyuni, Sefanadya Putri, Yulia Novika J., "Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung Menuju Desa Tangguh Covid-19," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)* 1, no. 2 (2021): 55.

<sup>29</sup> Yudi Yusnandi Dery Hendryan, Muhamad Rusjana, "Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 205.

<sup>30</sup> Nurul Hanifa and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 9–19, <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>.





- <https://lampung.bps.go.id/statictable/2015/08/06/255/banyaknya-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung-2020.html>.
- BPS Provinsi Lampung. "Jumlah Penduduk (Jiwa) 2020-2022." 2022, n.d.
- Budi Astuti. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Anak." *Jurnal Hukum* 35, no. 1 (2019).
- Darmin Tuwu, Bambang Shergi Laksmono, Abu Huraerah, Laode Harjudin. "Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10, no. 2 (2021): 97.
- Defilah, L, S Sarmiati, and E R Roem. "Hambatan Komunikasi Persuasif Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Dalam Program Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Kota Padang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16496–505.  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5116>.
- Dery Hendryan, Muhamad Rusjana, Yudi Yusnandi. "Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Operasi Yustisi Penanganan Covid-19." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 205.
- Farida. "Ketersediaan Anggaran Pembinaan, Wawancara,," n.d.
- Hafis Vian Yudha Ardhana, Rizky Ramadhani Satrio Wibisono, Muhammad Rayhan Kurnia Pratama, Sofiah Rizki Jannatulloh, Fachrurizal Mahendra Sujonot, Agung Wicaksono. "Kearifan Lokal Sebagai Solusi Penanganan Serta Mitigasi Pandemi Covid-19 Di Provinsi Lampung Dan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 5, no. 2 (2021): 251.
- Hakim, Fatwa Nurul. "Eksistensi Pendamping Sosial Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia* 8, no. 1 (2022).
- Hanifa, Nurul, and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. "Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 9–19.  
<https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>.
- James Anderson E. *Public Policy Making, Holt, Rinehart and Winston*. New York: CBS College Publishing, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Krisnawati Dwizka, Trisiana Anita, Mey Elynia, Elvidna Varelia, Maharani yesica Budi Puspita, Mardiana Zulf. "63 JGC IX (1) (2020) Jurnal Global Citizen Ketahanan Negara Republik Indonesia Masa Pandemi Covid-19 Dwizka Krisnawati (1) ,Anita Trisiana (2) ,Elynia Mey (3) ,Varelia Elvidna (4)." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, no. 1 (2020): 63–70. <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>
- Luthfi Muhamad Iqbal. "Menerka Kota-Kota Indonesia Dalam Batas-Batas Administrasinya 2015–2045." Medium, 2019. <https://luthfi-iqbal.medium.com/menerka-kota-kota-indonesia-19cef8cd3249>.
- Marco Ciotti, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng-Bin Wang & Sergio Bernardini. "The COVID-19 Pandemic." *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57, no. 6 (2020): 365–388.
- Muhyiddin. "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* IV, no. 2 (2020): 240.
- Ni Putu Ruslina Darmayanthi, Badrudin Kurniawan Publika. "Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur)." *Publika* 10, no. 1 (2022).
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru, 2002.
- Nurhadi. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana, 2007.
- Pangaribuan, Meilinda Triana, and Adis Imam Munandar. "Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (2021): 1–9.  
<https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.12706>.
- Suharto Edi. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial)*.



- Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suka, I Dewa Made. "Strategi Penguatan Fungsi Keluarga pada Era Pandemi Covid-19." *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2021).
- Susilowati, Ellya. "Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." *Sosio Informa* 8, no. 1 (2022).
- Vita Rachmawati, Dodi Faedlulloh. "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan." *Journal Of Political Issues* 2, no. 2 (2021).
- Wahyudin, Sumpeno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read, 2011.